

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DALM MENGIRIM PMC (PRIVATE MILITARY COMPANY) KE IRAK TAHUN 2011

Farras Abdu Zudma

Email: Farrasabduzudma11@gmail.com

Pembimbing: Drs H. Muhammad Saeri M.Hum

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is trying to explain about the policy of United States of America that send a Private Military Company to Iraq in 2011. United States is the country that has invaded Iraq in 2003 since beginning until the end of the war united state has use a Private Military Company to help and make a contribute for the war in Iraq.

This research is using realism perspective, realism is a perspective that explain about the national security concern in the world of anarchy international politics. This research is also using national interest theory which is explain why national sustainability matters.

Private Military Company was involved in much operation freedom in Iraq, because they are hire by United State of America itself ,even after that invaded lot of army from United State was going back to America and taking demilitarization in their homeland but not for the Private Military Company it's because United State still need their bargaining in Iraq and they need something that can be useful later.

Preventif action that United State made to Iraq, after the invaded was one of the scenario that united state ever made, because there is still other reason for United State to make a policy and it should be something useful and after the invaded United State made a decision to recovery and reconstruction for Iraq it is one of the reason why United State of America send a contractor or Private Military Company in Iraq.

Keyword: *Private Military Company, ratified, hegemony, national interest, foreign policy, violate, superiority*

PENDAHULUAN

Pasca invasi Irak yang melibatkan Amerika Serikat sebagai pelaku utama yang telah memakan waktu tiga belas tahun lamanya sejak 19 maret 2003. Alasan dari serangan atau invasi ini merupakan salah satu bentuk tindakan Amerika Serikat dalam mencegah terjadinya ancaman dunia karena dalam pandangan Amerika Serikat pada masa itu negara Irak yang di pimpin oleh

Saddam Hussein memiliki senjata pembunuh masal (*mass weapon*)¹. Alasan inilah yang membuat Amerika Serikat sangat percaya diri dalam melakukan penyerangan tersebut dan desakan dunia agar tidak

¹ "Irak Invasion Research Paper Feedback." April 2010. <http://www.essayforum.com/research-paper-s-11/Irak-invasion-research-paper-feedback-16503/>. Diakses pada, 28 September 2016.

terjadinya penyalahgunaan secara merata dalam produksi nuklir di muka bumi, namun seiring waktu setelah Amerika Serikat berjaya menjatuhkan kekuasaan Saddam Hussein mulai terungkap dan terjelaskan secara nyata alasan sebenarnya George W. Bush selaku Presiden Amerika Serikat pada masa itu bahwa apa yang pernah menjadi alasan mereka dalam menginvasi Irak tidaklah benar bahkan tidak ditemukan adanya senjata nuklir tersebut. Banyak negara mulai mengecam Amerika Serikat karena tujuannya yang sudah tidak jelas dan keberadaan tentaranya yang berada di Irak.

Berdasarkan kesepakatan keamanan Washington-Baghdad (*Status Of Force Agreement*) yang ditandatangani antara Irak dan Amerika Serikat pada era pemerintahan George W. Bush, seluruh tentara Amerika Serikat harus ditarik mundur dari Irak hingga akhir Desember 2011. Namun kini muncul keraguan soal komitmen Gedung Putih dalam merealisasikan program tersebut². Alasannya karena para pejabat teras politik dan militer Amerika dalam satu tahun terakhir sangat pro-aktif berusaha meyakinkan pemerintah Irak untuk menyetujui berlanjutnya kehadiran pasukan pendudukan.

Amerika Serikat mengirimkan tentara reguler beserta PMC sejak tahun 2003, namun peran PMC pada masa itu berbeda dengan tentara reguler karena PMC hanya bertugas sebagai suatu kesatuan yang mengawal dan memberikan keamanan dalam pengiriman logistik perang dan sebagainya. Tentara reguler Amerika Serikat dan PMC sudah berada sejak awal perang sampai akhir perang di Irak hingga membuat Amerika Serikat membuat beberapa pos pengamanan yang diisi oleh tentara reguler maupun PMC, setelah perang Irak berakhir Amerika sudah menarik mundur tentara

reguler nya secara berkala namun tidak dengan PMC yang berada di Irak

Setelah perang tersebut berakhir tentara reguler dan PMC bertugas untuk mengamankan kondisi Irak dikarenakan pasca perang mengalami konflik internal dan memberikan bantuan berupa pengamanan kedaulatan negara Irak karena di awal pasca perang antara Amerika Serikat dan Irak, pemerintahan Irak masih belum memiliki tentara nasionalnya sehingga pemerintahan Irak sedikit kewalahan dalam menangani konflik internal tersebut.

Para pejabat Gedung Putih berulang kali mengklaim bahwa penarikan mundur militer Amerika Serikat dari Irak akan menimbulkan banyak masalah bagi pemerintah Baghdad, termasuk instabilitas dan kerusakan. Hanya segelintir pejabat Irak termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Irak, Babker Zibari, yang termakan oleh bujukan Amerika Serikat. Menurutnya, pasukan keamanan Irak tidak akan mampu mengendalikan situasi dalam negeri hingga tahun 2020 tanpa bantuan militer asing³. Akan tetapi mayoritas pejabat Irak, termasuk Perdana Menteri Nouri al-Maliki berpendapat bahwa kehadiran pasukan asing sudah tidak diperlukan lagi. Pasukan pendudukan harus meninggalkan Irak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pernyataan Obama soal penarikan mundur pasukan dari Irak bukan jaminan bahwa komitmen Amerika akan terlaksana. Para pengamat berpendapat bahwa Amerika yang hingga kini telah dengan segala cara berusaha memberikan perpanjangan misi militer AS di Irak, tidak mungkin dengan mudah menarik mundur pasukannya dari negeri pendudukan itu. Bahkan para pejabat Irak sendiri meragukan komitmen Amerika dalam hal ini⁴.

² Cahyo, Agus. 2011. Tokoh-Tokoh Timur Tengah Yang Menjadi Antek Amerika Dan Sekutunya DIVA Press : Jogjakarta, hal 56.

³ Agus cahyo. "Tokoh-Tokoh Dunia Yang Paling Dimusuhi Amerika Dan Sekutunya". 2011: DIVA Press : Jogjakarta hal. 3

⁴ *Ibid*

Diperkirakan strategi baru Amerika Serikat lebih terfokus pada pengokohan kehadirannya secara regional bukan hanya di Irak, apalagi masalah penarikan mundur pasukan dari Irak juga belum jelas, menyusul pernyataan Washington yang akan menambah jumlah pegawai kedutaan besarnya di Baghdad dan konsulatnya di Irak.⁵ Strategi baru Amerika Serikat untuk Timur Tengah akan dipublikasikan dalam bulan-bulan mendatang dan ketika itulah terungkap makna dari komitmen Obama untuk menarik mundur pasukan Amerika Serikat dari Irak. Mungkin juga Amerika Serikat lebih memilih kehadiran lunak dibanding kehadiran pasukan marinirnya di Irak.

Situasi politik di negeri Irak pasca Invasi Amerika ini pun tidak akan terpisah dari kenyataan, antara para pendukung Saddam dan yang kontra terhadapnya, antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah, antara suku Kurdi dan suku-suku lain yang merasa berhak terhadap tampuk pemerintahan Irak. Meskipun saat ini telah terdapat pemerintahan darurat dari hasil aklamasi rakyat, namun hal itu belum menunjukkan iklim yang positif terhadap suasana perpolitikan yang demokratis di Irak.

Pertarungan dan pertikaian tiga kelompok di Irak membuat Amerika Serikat turut serta dalam permasalahan tersebut dan membuat Amerika terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Amerika menurunkan tentaranya dalam mengamankan dan membangun markas

militer Amerika sendiri di Irak dan setiap tahun mengirimkan tentaranya baik tentara nasional dan tentara bayaran atau yang lebih sering disebut Perusahaan Militer Swasta (*Private Military Company*). PMC yang dikontrak oleh Amerika Serikat kepada beberapa kontraktor atau perusahaan militer swasta yang ada di Amerika Serikat⁶. Pasca invasi memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas pembangunan yang sedang dilakukan di Irak. Pembangunan kembali (rekonstruksi) yang dimaksud tentu saja rekonstruksi yang beririsan antara korporasi yang menyewa mereka dengan PBB. Bagi para korporasi yang menyewa mereka, tujuan dari aktivitas mereka yang akan menjamin keberlangsungan investasi energi dinegara itu, tentu saja hal ini sangat jelas.

Keberadaan Amerika di Irak pasca invasi tersebut menimbulkan banyak masalah yang berakhir dengan memakan korban. Tercatat sebanyak 40.000 serdadu Amerika Serikat dikirim dalam misi invasi Irak dimulai dari tahun 2003 hingga 2011 dan 1800 kontraktor atau tentara bayaran dari beberapa perusahaan militer swasta.⁷ Banyaknya korban yang tercatat kurang lebih 4000 korban tewas yang telah dialami oleh tentara nasional Amerika di tanah konflik yaitu Irak mengakibatkan banyaknya kecaman keras dari masyarakat Amerika terutama bagi keluarga yang memiliki anak atau saudara yang menjadi tentara dan bertugas di Irak menuntut segera pemulangan tentara nasional Amerika Serikat kembali ke tanah airnya dan membiarkan Irak agar bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan dalam negerinya sendiri. Permintaan sangat sulit

⁵ Leonardo. "Peran Amerika di Irak" diakses dari: http://indonesian.irib.ir/hidden-1/-/asset_publisher/m7UK/content/masa-depan-politik-as-di-irak?redirect=http%3A%2F%2Findonesian.irib.ir%2Fhidden-1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m7UK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2, Pada tanggal 14 oktober 2016

⁶ <https://fersyhana.wordpress.com/2011/12/22/invasi-amerika-serikat-ke-irak-tahun-2003/> diakses pada tanggal 1 mei 2016

⁷ Reuters, "AS tambah kontraktor menggantikan militer nasional", CNN Indonesia, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/201412/5025001-120-20396/as-tambah-kontraktor-militer-swasta-di-irak/>, pada tanggal 01 mei 2016.

diwujudkan ketika Amerika masih di pimpin oleh Presiden George W. Bush sampai berakhir kepemimpinan dan beralih ke tangan Barack Obama sebagai Presiden kulit hitam pertama di tahun 2010/2011 dan mulai menunjukkan titik terang yang dimana setelah bertahun-tahun perdebatan yang terjadi demi memulangkan dan mendemiliterisasi tentara Amerika yang ada di Irak mulai bisa terwujud, tentara Amerika Serikat secara berangsur mulai ditarik kembali ke Amerika Serikat dan sebagian ada yang sudah di demiliterisasi oleh pemerintah demi mengurangi anggaran negara, namun dibalik berkurangnya dan dikembalikannya serdadu Amerika dari Irak lalu sebaliknya Amerika malah menambah personil PMC dan memperpanjang kontrak dengan beberapa perusahaan militer swasta yang ada di Amerika.

Banyak pertimbangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat demi mempertahankan beberapa kepentingannya di Irak. Amerika Serikat memberdayakan jasa PMC dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Banyak yang tidak tahu bahwa, *Private Military Companies* (PMC) merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya pada keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan data intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan perawatan senjata dan perawatan.⁸

Kehadiran PMC adalah bagian dari konteks permasalahan di atas. Mereka (tentara bayaran) menjadi bukti betapa besarnya ambisi ekonomi AS untuk menguasai minyak Irak. Pemerintah Amerika Serikat menyewa jasa tentara bayaran melalui perusahaan penyedia tentara bayaran untuk mengamankan investasi

perusahaan asal Amerika Serikat yang ada di Irak. Selain itu, personil PMC ini juga di sewa untuk menjaga aset politik pemerintah Amerika Serikat di Irak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁹.

Teknik penelitian yang digunakan peneliti adalah teknik *library research* atau teknik kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber yakni berupa literatur-literatur (buku), artikel-artikel dari jurnal ilmiah dan dari situs internet yang mendukung pengumpulan data baik data sekunder peneliti menggambarkan keadaan-keadaan atau suatu fenomena yang terjadi yang dapat diamati dari kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian. Secara prakteknya peneliti sekaligus menggali informasi dari subyek penelitian, kemudian hasil penelitian diungkapkan dengan kalimat. dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan data data atau bahan yang dikumpulkan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan

⁸ Sabrina Schulz and Christina Yeung. *Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender*. 2008: IDSPS Press. Hal. 2

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, : Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 9

PEMBAHASAN

Pasca Operasi Pembebasan Irak (Operation Iraqi Freedom/OIF) yang terjadi pada pertengahan 2003, Amerika Serikat dan koalisinya serta berbagai bantuan organisasi internasional berusaha menunjukkan berbagai upaya untuk membangun kembali Irak terutama pasca bertahun-tahun terabaikan dan keterlibatan dalam beberapa perang. Rekonstruksi yang berlangsung sejak berakhir invasi dilakukan dalam bentuk pembangunan kembali sistem pemerintahan baru hingga pembangunan gedung-gedung yang berfungsi untuk pembangunan kebutuhan dan keperluan pemerintah Irak, meskipun kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak kepresidenan George W. Bush hingga berakhirnya kepemimpinan dan digantikan oleh presiden Barrack Obama yang terus berlangsung sehingga kebutuhan Private Military Company di Irak terasa sangat diperlukan dengan berbagai keperluan dan tujuan yang ingin di capai Amerika Serikat.

Proses rekonstruksi pasca operasi militer, Amerika Serikat terlihat memiliki ketergantungan cukup besar terhadap kontraktor PMC. Meskipun eksistensi PMC bukanlah sesuatu yang baru, bahkan dalam proses rekonstruksi menunjukkan adanya penggunaan aktor non-negara dibidang keamanan yang cukup besar bahkan memiliki rasio nyaris 1 berbanding 1 dengan pasukan bersenjata formal. David Isenberg mengutip catatan Departemen Pertahanan Amerika Serikat melihat adanya beberapa faktor yang mendorong peningkatan permintaan Amerika Serikat atas kontraktor PMC, yaitu: 1) Terjadi pengurangan postur militer pasca invasi Irak; 2) peningkatan ketergantungan terhadap kontraktor PMC untuk penyediaan persenjataan terbaru dan jasa pendukung terhadap sistem persenjataan tersebut dalam jangka panjang; 3) Misi Departemen Pertahanan untuk meningkatkan efisiensi sehingga tersisa dana yang dapat digunakan dalam perawatan serta modernisasi program;

dan 4) Untuk meningkatkan tempo operasi. Faktor lain, menurut Isenberg, yang dianggap cukup signifikan adalah munculnya gelombang ketiga (third wave) di dalam pentagon. Gelombang ketiga ini menurut Sekretaris Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Thomas E. White, sebagai sebuah rencana dari kalangan militer untuk meningkatkan keuntungannya terhadap sektor swasta. White mengemukakan bahwa pasukan bersenjata formal kurang memiliki basis informasi yang efektif sebagaimana performa yang ditunjukkan oleh kontraktor PMC. Inisiatif gelombang ini kemudian ingin merencanakan suatu peningkatan jumlah pasukan garis depan hingga 20.000 personil dengan jalan mengganti personel pendukung (back-room personel) dengan kontraktor. Dalam satu dekade ditargetkan terjadi peningkatan hingga 300.000 personil garis depan. Gejala ini juga ditunjukkan dengan munculnya doktrin Rumsfeld yang mendasari kebijakan baru pentagon untuk menggunakan secara signifikan sektor swasta, menekankan pada aksi tersembunyi (covert action), sistem persenjataan canggih, serta penggunaan pasukan khusus dan kontraktor.

Jika ditinjau dari segi pendanaan rekonstruksi, pemerintah Amerika Serikat sendiri memang menetapkan anggaran dana khusus untuk mendukung proses rekonstruksi tersebut. Kontraktor PMC di Irak secara umum dikontrak oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Terlihat bahwa dana rekonstruksi yang diberikan kepada Departemen Luar Negeri maupun Departemen Pertahanan sedikit banyak kemudian beralih ke tangan para kontraktor PMC tersebut. Pada perhitungan anggaran tahun 2008 sendiri dana IRRF diobligasikan kepada skema WPPS II sebesar 9,4% dari total nilai kontrak sebesar 1,069 milyar dollar. Berdasarkan sektornya, terdapat beberapa pelayanan keamanan yang

disediakan oleh kontraktor PMC yang beroperasi di Irak.

1. Keamanan Statis, meliputi keamanan untuk area pemukiman dan kerja, termasuk instalasi militer Amerika Serikat

2. Keamanan Personel, meliputi keamanan bagi pejabat tinggi Amerika Serikat dan personil Kepala Misi (chief of mission)

3. Jasa Pengawalan, meliputi keamanan bagi pegawai pemerintah Amerika Serikat, staf kontraktor dan lainnya yang melakukan perjalanan melalui Irak

4. Keamanan konvoi, meliputi keamanan bagi kendaraan-kendaraan dan pengendaranya ketika melakukan perjalanan ke Irak maupun di dalam Irak

5. Perencanaan dan konsultasi keamanan.

Berikut merupakan pihak-pihak yang memperkerjakan kontraktor PMC di Irak dan karakter kontrak yang diberikan.

Departemen Pertahanan menggunakan jasa kontraktor pada tugas penjagaan atas pejabat militer senior seperti Jenderal Komando Pasukan Multi Nasional (Commanding General of the Multi-National Force) Irak dan personel dari pasukan Mekanis Angkatan Bersenjata (the Army Corps of Engineers); penjagaan fasilitas militer; dan penjagaan terhadap lebih dari 19.000 konvoi pasukan logistik yang bergerak diseluruh Irak. Sedangkan Departemen Luar Negeri menggunakan kontraktor PMC pada jasa penjagaan atas duta besar, pejabat atau staf pemerintahan Amerika Serikat secara umum, dan anggota kongres atau badan eksekutif yang berkunjung ke Irak. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut diperkirakan Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri mengontrak sekitar 11.000 staf keamanan swasta yang terdiri dari 9.952 staf dikontrak oleh Departemen Pertahanan dan 1.400 staf oleh Departemen Luar Negeri .

Untuk keperluan Departemen Pertahanan, kontraktor PMC menyediakan

jasa keamanan dalam lingkup yang cukup luas dan bervariasi, diantaranya penyediaan parameter statis dan keamanan internal di Victory Base Complex di Baghdad; dan koordinasi pergerakan seluruh staf Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan kontraktor PMC lainnya di seluruh Irak. Kontraktor juga diberi tugas untuk mengumpulkan, menerjemahkan, dan menyebarkan informasi mengenai situasi keamanan ke seluruh Irak serta mengawal konvoi dan para staf yang bertugas di Irak.

Didalam skema Biro Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, setidaknya terdapat 1500 agen khusus yang bertugas di 285 kantor perwakilan di seluruh dunia. Agen-agen khusus ini berfungsi sebagai petugas penegak hukum dalam hal pencegahan pemalsuan visa dan paspor, pengawasan program pelatihan dan bantuan anti-terorisme diseluruh dunia, menyediakan layanan kurir, dan menyediakan berbagai layanan proteksi bagi Menteri Luar Negeri, Duta Besar Amerika Serikat di PBB, serta pejabatasing yang berkunjung ke Amerika Serikat. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Departemen Luar Negeri ternyata sudah hampir 20 tahun mempergunakan jasa kontraktor PMC baik untuk pengamanan misi maupun personel diseluruh dunia. Biro keamanan diplomatik Amerika Serikat bertanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan keamanan bagi staf Amerika Serikat di Irak yang tergolong sebagai wilayah konflik.

Departemen Pertahanan maupun Luar Negeri Amerika Serikat dalam kerjasamanya dengan Kontraktor PMC pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kedua otoritas ini harus bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan, koordinasi, dan akuntabilitas terhadap para kontraktor PMC tersebut. Di samping kedua otoritas tersebut, di dalam sistem koordinasi yang melingkupi kontraktor PMC yang beroperasi

di Irak, pemerintah Irak diharapkan untuk berperan dalam pengawasan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa keterlibatan kontraktor PMC di Irak cukup signifikan baik dari segi dana yang dialokasikan maupun jumlah personel yang dipekerjakan. Terlihat pula bahwa ketergantungan pemerintah Amerika Serikat terhadap PMC untuk proses rekonstruksi Irak cukup kuat dengan melibatkan mereka dalam berbagai lingkup tugas keamanan. Sehingga hubungan saling ketergantungan antara pemerintah Amerika Serikat terhadap kontraktor PMC pada dasarnya cukup kuat. Tanggung jawab dalam hal pengawasan serta kontrol atas kontraktor PMC menjadi penting karena kewajiban dan hak kedua belah pihak bergantung kepada kontrak yang telah ditandatangani dan bukan pada garis struktural institusional. Dengan didasari pemahaman akan skema rekonstruksi serta kaitannya proses tersebut dengan hadirnya kontraktor keamanan Irak.

4.2 Kepentingan Amerika Serikat dan Monopoli Minyak Dunia

Kehadiran militer Amerika Serikat memang diperlukan dalam masa pasca pemerintahan Saddam. Hal ini diperlukan untuk memastikan akses Amerika Serikat terhadap minyak di Irak tetap ada. Keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di sekitar daerah pertambangan minyak dan saluran-saluran pipa minyak berguna dalam menjaga dan mengamankan kegiatan penambangan minyak dan pengangkutan minyak dari kilang hingga jalur pendistribusiannya ke Teluk Persia.

Disamping menjaga wilayah Irak dari keamanan terhadap kelompok insurgensi, beberapa jumlah pasukan Amerika Serikat yang berada di Irak memang ditugaskan untuk menjaga saluran pipa minyak rawan diserang, kilang produksi minyak, fasilitas penampungan dan instalasi bahan bakar minyak. Hal ini sangat diperlukan karena serangan gerilya dari kelompok insurgensi

dapat saja terjadi sewaktu-waktu, dan serangan mereka bisa berupa ledakan maupun gencatan senjata yang dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Contohnya saja pada bulan April 2004, terjadi penyerangan terhadap pelabuhan Khor Al-Amaya, tempat yang biasanya digunakan untuk menampung minyak produksi di Irak sebelum di ekspor. Hal ini membawa kerugian yang cukup besar bagi pemerintah Irak serta Amerika Serikat di wilayah tersebut. Penurunan produksi harus dicegah dengan menempatkan dan memastikan keamanan di wilayah Irak agar produksi minyak dapat berlangsung secara aman dan terkendali.

Mengingat kebutuhan dan permintaan minyak Amerika Serikat yang minyak dalam jumlah yang tinggi, mengakibatkan keberadaan dan keberlangsungan kegiatan penambangan minyak perusahaan Amerika Serikat di Irak tetap harus berlangsung dalam kondisi apapun. Produksi penambangan minyak Amerika Serikat di Irak menghasilkan tidak hanya untuk Amerika Serikat, namun juga dibagi dengan kepentingan pemerintahan Irak, untuk kepentingan warga Irak, pembangunan negara/ infrastruktur serta pendapatan negara dari hasil ekspor minyak kenegara lain.

Keberadaan pangkalan atau markas militer Amerika Serikat yang di amankan oleh tentara dan PMC di titik-titik kilang minyak juga penting dalam menghadapi serangan yang datang dari kelompok insurgensi. Beberapa diantaranya yang berada di Baghdad, perkemahan Anakonda misalnya, ditujukan untuk menjaga keberadaan saluran minyak dan kilang minyak di daerah tersebut. Disamping menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, keberadaan militer dan personel Amerika Serikat beserta beberapa kontraktor PMC ditempat tersebut memastikan bahwa kegiatan penambangan tetap dapat berjalan dan menghasilkan minyak perharinya, sesuai dengan harapan Amerika Serikat yang disamping untuk memenuhi kebutuhan akan

minyak, ekspor minyak dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

Saat pasca invasi Amerika Serikat ke Irak, banyak perusahaan Amerika Serikat yang berlomba dalam mendapatkan kendali atas tambang-tambang minyak yang berada di wilayah Irak. Keberadaan dan potensi penambangan di wilayah Irak yang sangat murah produksinya serta banyaknya cadangan yang dihasilkan untuk minyak sangat membuat banyak perusahaan minyak Amerika Serikat ingin memenangkan kontrak kerjasama dengan pemerintah Irak. Hingga tak jarang tiap perusahaan yang berhasil memenangkan kontrak tersebut memintak bantuan Departemen Pertahanan dan Luar Negeri untuk memberikan perlindungan di titik-titik produksi yang berada di area rawan konflik.

Salah satu implikasi yang didapatkan dari invasi Amerika Serikat ke wilayah Irak adalah kekosongan pemerintahan dan perubahan kebijakan pemerintah baru Irak, yang notabene dibantu pembentukannya oleh pihak Amerika Serikat melalui bantuan dan konsultasi yang diberikan oleh pihak Keduatahan Besar Amerika Serikat dan PMC di Irak. Di samping itu Amerika Serikat bersama-sama dengan beberapa perusahaan minyak Inggris, mulai membuat kontrak-kontrak kerjasama antar perusahaan minyak mereka dengan pemerintahan Irak.

Perusahaan minyak Halliburton yang dikepalai oleh Dick Cheney tidak lupa ikut memperjuangkan agar kontrak harus ditandatangani oleh pemerintah Irak yang baru, dan agar proses penambangan minyak di Irak dapat di pegang dan dikuasai kembali oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan minyaknya serta meraup keuntungan yang jumlahnya tidak sedikit.

Hasil dari invasi Amerika Serikat ke Irak memang membuka kesempatan dan peluang emas pembukaan tambang minyak. Disamping perusahaan Halliburton, beberapa perusahaan minyak Inggris dan Amerika

Serikat seperti Shell, BP, Exxon Mobil dan Chevron ikut memulai usaha penambangan minyak di Irak, pasca pemerintahan Saddam, yakni mulai dari berakhirnya invasi, hingga tahun-tahun kedepan. Negara yang sangat besar dan sangat membutuhkan minyak seperti Amerika Serikat tentu tidak akan menolak kesempatan emas yang terbuka lebar ini. Disamping dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Amerika Serikat, penambangan minyak dapat membantu menopang kebutuhan ekonomi pemerintah Irak yang baru juga.

Kondisi pemerintah baru Irak yang dihadapi dengan kehancuran yang cukup dahsyat akibat perang dan invasi yang terjadi, mengakibatkan pemerintah Irak membutuhkan dana untuk pembangunan dan pemenuhan kebutuhan bagi rakyatnya. Negara Irak yang kaya akan minyak tentunya menjadi salah satu alternatif utama bagi pemerintah Irak yang baru dalam meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan. Kedatangan perusahaan minyak dan menambah pendapatan negara Irak.

Pengamanan terhadap kilang-kilang minyak yang dibangun di Irak terhadap penyerangan dari kelompok insurgensi sangat penting. Karena kelangkaan atau terhambatnya proses penambangan di Irak, akan berpengaruh tidak hanya pada Amerika Serikat namun juga terhadap pembangunan negara Irak. Dari sebab itu segala kebutuhan yang dibutuhkan baik itu keamanan dan ketertiban selama proses penambangan minyak tersebut selalu diawasi dan di jaga oleh PMC yang dikontrak sesuai permintaan pemerintah Amerika Serikat maupun dari permintaan perusahaan bersangkutan itu sendiri.

Kasus penyerangan terhadap kilang minyak Amerika Serikat di Irak cukup banyak terjadi. Hal ini dilakukan oleh kelompok insurgensi yang tidak senang dengan pemerintahan Irak yang baru maupun keberadaan Amerika Serikat di wilayah negara Irak. Namun Amerika Serikat sebagai negara

yang bertanggung jawab dalam pengamanan kepentingan nasional Amerika Serikat yakni mencukupi kebutuhannya akan minyak dan meningkatkan ekonomi baik untuk pemerintah Irak yang baru maupun untuk Amerika Serikat. Pengamanan terhadap serangan kelompok pemberontak atau insurgensi tidak bisa ditangani oleh pasukan keamanan pemerintah Irak yang baru saat ini. Kurangnya personil, pelatihan dan senjata merupakan hal yang menyebabkan tidak mampunya pasukan pengamanan di Irak dalam menghadapi penyerangan kelompok insurgensi.

Banyaknya penyerangan oleh kelompok insurgensi terhadap fasilitas penambangan minyak Amerika Serikat maupun Inggris di Irak secara tidak langsung menyebabkan tingkat ekspor minyak Irak menurun drastis. Dari target yang awalnya yaitu 2,4 miliar barrel per-hari menurun hingga pernah menyentuh 0,86 miliar per barrel per hari. Penyerangan yang dilakukan terhadap pipa pengangkut minyak utama bisa sangat mempengaruhi penambangan minyak di Irak .

4.3 Hegemoni keamanan Amerika Serikat di Timur Tengah

Negara Amerika Serikat terus mendapat kecaman dan protes yang diberikan oleh beberapa negara maupun dari pihak rakyat Amerika Serikat itu sendiri karena pencapaiannya terhadap invasi Irak di tahun 2003 sudah dianggap tercapai, namun keberadaan tentaranya yang terus bertambah dan bergantian di negara Irak memperburuk opini publik terhadap tujuan Amerika Serikat yang sebenarnya. Kebijakan Amerika Serikat pada masa era kepresidenan Barrack Obama yang memulangkan dan melakukan demiliterisasi terhadap tentara yang pernah bertugas di Irak dianggap langkah yang benar dan didukung oleh banyak pihak, namun dilain kebijakan ini mempengaruhi kepentingan Amerika Serikat yang membuat pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah melemah.

Pihak-pihak yang bersebarangan terhadap kebijakan yang diambil oleh presiden Barrack Obama dinilai salah dan merugikan untuk Amerika Serikat . Banyak pengaruh Amerika yang akan hilang di Timur Tengah belum lagi tekanan yang diberikan terhadap beberapa negara yang sewaktu waktu bisa mengancam negara Amerika Serikat dinilai sebagai ancaman terbesar saat ini. Oleh sebab itu banyak pihak dari dalam dan luar negeri Amerika Serikat untuk mengambil langkah pencegahan dan penekanan terhadap beberapa wilayah di Timur Tengah oleh dikarenakan rasionalisasi ini lah peran militer Amerika Serikat di Irak harus tetap ada namun penarikan pasukan militer yang bertugas di Irak tetap berlangsung secara berkala dan disesuaikan dengan penambahan kontrak Private Military Company di Irak.

Posisi negara Amerika Serikat yang secara geografis terpisah jauh dengan negara-negara di Timur Tengah menyebabkan Amerika Serikat jelas kesulitan dalam mengawasi maupun menjaga agar kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah tidak muncul dan menjadi ancaman terhadap Amerika Serikat dan dunia. Salah satu usaha Amerika Serikat dalam mendekati wilayah tersebut adalah dengan bergerak menyerang dan menempati Irak.

SIMPULAN

Keterlibatan Private Military Company dalam operasi pembebasan atau yang lebih dikenal sebagai tindakan invasi terhadap negara Irak pada masa rezim Saddam Hussein dianggap sebagai salah satu tindakan yang berperan penting dalam invasi tersebut, karena banyaknya personel atau kontraktor Private Military Company turun ke medan perang ketika invasi berlangsung, peran Private Military Company yang turun ke medan perang hanya diketahui beberapa pihak sebagai bentuk dukungan dan bantuan dalam penyediaan keperluan yang dibutuhkan oleh pihak militer Amerika Serikat namun tidak

jarang kontraktor tersebut ikut dalam aksi baku tembak dan misi pembebasan negara Irak yang sering mereka tekankan terhadap publik.

Amerika Serikat berhasil menuntaskan tujuan yang mereka lakukan kepada negara Irak, lalu pemimpin Irak yaitu Saddam Hussein juga berhasil dihukum mati sesuai aturan hukum yang berlaku namun keberadaan militer Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap negara Irak masih sangat kental dan dianggap sebagai pendudukan kekuasaan di negara Irak itu sendiri. Pihak Amerika Serikat menganggap aksi tersebut salah satu bentuk bantuan dan tanggung jawab selepas perang, dalam hal ini peran yang dilakukan Amerika Serikat adalah membentuk pemerintahan baru yang di latar belakang oleh Amerika Serikat dan dilandasi oleh Demokrasi.

Peran Private Military Company di Irak dikaitkan dalam bentuk bantuan penanganan dan penyaluran bantuan kebutuhan perang secara langsung yang dimana Private Military Company terjun langsung dalam medan perang lalu ikut mengamankan pengiriman pasokan perang hal ini serupa dengan tindakan yang dilakukan oleh Private Military Company ketika beroperasi di Irak pasca invasi. Pengaruh militer Amerika Serikat di Irak semakin dipertanyakan karena dengan berakhirnya invasi dan pendudukan militer Amerika Serikat di Irak lantas jumlah korban yang dialami oleh personel tentara Amerika Serikat juga terus ada dan tidak tampak tujuan sebenarnya tentang keberadaan tentara Amerika Serikat.

Pemerintahan presiden George W. Bush telah berakhir dan berganti menjadi pemerintahan presiden Barrack Obama yang sangat fokus terhadap keberadaan militer Amerika Serikat, hal ini dikarenakan bagi Obama alasan militer Amerika Serikat di Irak sudah tidak jelas namun sebagian lagi diperlukan demi tindakan pencegahan, namun jumlah yang dikirim ke Irak dinilai sudah sangat berlebihan karena merugikan ekonomi Amerika Serikat dan juga

merugikan bagi rakyat dan keluarga dari personel tentara Amerika Serikat yang bertugas di Irak, banyak nya korban yang terluka dan ada sebagian yang jatuh korban memberikan dampak yang buruk bagi pemerintahan Amerika Serikat pada masa itu.

Banyak nya penolakan yang dilakukan oleh beberapa pihak dari publik maupun media massa yang semakin menekan dan membuktikan betapa tidak efektif nya tindakan Amerika Serikat mengirim lagi tentara nya, karena hal ini hanya akan semakin memperburuk keadaan dan merusak citra pemerintahan Barrack Obama, lalu dengan membuat kebijakan yang dinilai sebagai tindakan yang benar demi membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Secara berkala pemerintahan Amerika Serikat mulai menarik pasukan kembali ke Amerika Serikat, bahkan melakukan tindakan demiliterisasi dini demi mengurangi anggaran yang terus menjadi permasalahan besar bagi Amerika Serikat, ketika itu Obama beranggapan bahwa kesalahan terbesar Amerika Serikat ialah banyak melakukan aksi yang membuang-buang uang dan membuang-buang nyawa yang tidak bersalah. Pernyataan tentu saja sangat berbalikan dengan tujuan Obama ketika jadi presiden yang memegang prinsip “cepat, irit dan tepat”

Dibalik kebijakan yang diambil oleh presiden Barrack Obama masih terdapat beberapa pihak yang tidak menyetujui dan mendukung tindakan yang diambil oleh presiden Barrack Obama, banyaknya alasan yang mereka anggap sebagai kerugian untuk beberapa pihak membuat banyaknya tekanan diberikan kepada pemerintahan Barrack Obama. Namun dengan adanya pemikiran-pemikiran yang dianggap rasional bagi pihak pemerintahan Amerika Serikat lantas memberikan sebuah tindakan pencegahan dan penanggulangan dengan cara memperpanjang dan menambah personel kontraktor Private Military Company untuk dikirim ke negara Irak.

Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Amerika Serikat pada masa itu dinilai sebagai tindakan pertanggung jawaban untuk melakukan rekonstruksi dan pembangunan kembali negara Irak, lalu dengan adanya permintaan yang ditawarkan oleh pemerintahan Irak kepada Amerika Serikat agar bisa memberikan bantuan berupa pelatihan militer bagi militer yang baru dibentuk oleh pemerintahan Irak. Disamping kepentingan tersebut pihak Amerika Serikat membutuhkan pengamanan aset-aset pemerintahan Amerika Serikat yang berada di Irak berupa kedutaan besar Amerika Serikat dan beberapa perusahaan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintahan Amerika Serikat atau dimiliki oleh penduduk yang berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Kemudian dengan adanya Private Military Company di Irak memberikan rasa aman bagi para penambang minyak yang berlokasi di daerah Irak, karena ramainya terjadi konflik internal tidak jarang menyeret para pekerja yang ada ditambang minyak dan berujung dengan adanya penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok militan ekstremis di Irak. Dalam pandangan kelompok militan yang berada di Irak mereka melihat bahwa keberadaan Amerika Serikat di Irak dirasakan tidak dibutuhkan kembali malh dinilai sangat merugikan karena dominasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Amerika Serikat memberikan dampak buruk dan kerugian besar bagi pemerintahan Irak yang baru.

Minyak menjadi tujuan utama Amerika Serikat masih mempengaruhi negara Irak karena dengan segala kebutuhan dan ketergantungan minyak nya yang besar membuat Amerika Serikat ikut terlibat dalam proyek penambangan minyak berskala besar karena di era dunia yang semakin berkembang dan minyak menjadi prioritas utama dunia membuat Amerika Serikat membutuhkan pengamanan ekstra di lokasi yang rawan konflik tersebut, namun Keberadaan pangkalan atau markas militer Amerika

Serikat yang diamankan oleh tentara dan PMC di titik-titik kilang minyak juga penting dalam menghadapi serangan yang datang dari kelompok insurgensi. Beberapa diantaranya yang berada di Baghdad, Camp Anaconda misalnya, ditujukan untuk menjaga keberadaan saluran minyak dan kilang minyak di daerah tersebut. Disamping menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, keberadaan militer dan personel Amerika Serikat beserta beberapa kontraktor PMC ditempat tersebut memastikan bahwa kegiatan penambangan tetap dapat berjalan dan menghasilkan minyak perharinya, sesuai dengan harapan Amerika Serikat yang disamping untuk memenuhi kebutuhan akan minyak, ekspor minyak dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Saat pasca invasi Amerika Serikat ke Irak, banyak perusahaan Amerika Serikat yang berlomba dalam mendapatkan kendali atas tambang-tambang minyak yang berada di wilayah Irak. Keberadaan dan potensi penambangan di wilayah Irak yang sangat murah produksinya serta banyaknya cadangan yang dihasilkan untuk minyak sangat membuat banyak perusahaan minyak Amerika Serikat ingin memenangkan kontrak kerjasama dengan pemerintah Irak. Hingga tak jarang tiap perusahaan yang berhasil memenangkan kontrak tersebut memintak bantuan Departemen Pertahanan dan Luar Negeri untuk memberikan perlindungan di titik-titik produksi yang berada di area rawan konflik.

Keberadaan Amerika Serikat beserta militernya di negara Irak sedikit banyak membantu Amerika Serikat dalam mengawasi dan mengendalikan kekuatan-kekuatan yang mengancam perdamaian dunia. Adanya kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kekacauan dan pemberontakan di wilayah Timur Tengah sedikit banyak tercerminkan dengan peristiwa pemboman dengan menggunakan taktik bom bunuh diri, maupun perusakan terhadap fasilitas umum dan juga pembunuhan massal oleh sekelompok

separatis dan teroris di Irak, sebagai salah satu negara yang dijaga oleh Amerika Serikat di Timur Tengah.

Kebijakan Amerika Serikat dalam mengirim Private Military Company ke Irak dinilai sebagai bentuk kepentingan dasar suatu negara demi mempertahankan eksistensinya dan mendapatkan sumber daya alam yang berguna dan bermanfaat bagi kebutuhan Amerika Serikat itu sendiri karena ketika Amerika yang mulai secara perlahan menarik mundur tentaranya dari Irak tentu akan mengurangi pengaruh terhadap negara Irak dan Timur Tengah sehingga demi mengheah adanya perlawanan dan lepasnya aset-aset yang dinilai penting bagi Amerika Serikat membuat negara tersebut mengontrak lebih banyak Private Military Company untuk memberikan pengaruh militer yang baru terhadap negara Irak dan ikut membantu rekonstruksi pemerintahan Irak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Alexandre Faite. 2004. *Involvement of Private Contractors in Armed Conflict: Implications Under International Humanitarian Law*, Defense Studies, Vol.4. Blackwater USA. 2007. *Hearing Before the Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives One Hundred Tenth Congress, First Session.*

Deborah Avant and Lee Sigelman, *What Does Private Security in Iraq Mean for US Democracy?* Paper prepared for the 2009 annual meeting of the International Studies Association, New York.

Doyle dan Michael W. 1983. *Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs Part 1. Philosophy and Public Affairs.*

Isenberg, David. 2009. *Private Military Contractors and U.S. Grand Strategy*. PRIO report 1/2009: International Peace Research Institute, Oslo.

Katherin Fallah. 2006. *Aktor Korporasi: Status Hukum Tentara Bayaran dalam Konflik*

Bersenjata, International Review of the Red Cross, Vol. 88.

Lindsay Cameron. 2006. *Perusahaan Militer Swasta: Status mereka berdasarkan Hukum humaniter dan Dampaknya terhadap Peraturan tentangnya*. International Review of the Red Cross, Vol.88.

Melvin Small dan J. David Singer. 1976. *The War-Proneness of Democratic Regimes*. The Jerusalem Journal of International Relations.

Nigel D. White and Sorcha MacLeod, *“EU Operations and Private Military Contractors: Issues of Corporate and Institutional Responsibility,”* European Journal of International Law, Vol. 19. No. 5, 2008, pp. 965-988.

Puspita, Diana. 2013. *Irak Pasca Invasi Amerika Serikat*. FKIP Unila: Bandar Lampung.

Stranger, Allison. 2006. *Private Military Corporation: Benefit and Cost of Outsourcing Security*. Yale Journal of International Affairs

Susan Marble Barranca, *Unbecoming Conduct: Legal and Ethical Issues of Private Contractors in Military Situations*, International Society for Military Ethics Conference, 2009, P.21

Buku

A.K. Syahmin. 1985. *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*. Bandung : Bina Cipta.

Ahmad Baharudin Naim. 2010. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Anak Agung Banyu Perwita dan Nyanyan Mohamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Arlina Permanasari, dkk.. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta :ICRC.
- Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional – Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi Kedua. Bandung : PT Alumni.
- Boris Kanzleiter dan Dario Azzelini. 2005. La Empresa Guerra. Yogyakarta: INSIST Press.
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater, 1996, *Teori-teori Hubungan Internasional*, New York: St Martin's Press.
- Erika Morris. - . Private Warfare : History of the Increasing Dependency on Private Military Corporations and Implications. Utah : Utah State University.
- Fadillah Agus. 1999. Hukum Perang Tradisional di Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI._____ . 2007. Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: Elsam.
- Frits Kalshoven. 1991. Constraint on the Waging of War. Jeneva : ICRC.
- Hans-Peter Gasser. 1993. International Humanitarian Law, an Introduction. Berne-Stuttgart-Vienna : Paul Haupt Publisher.
- Haryomataram. 1994. Hukum Humaniter. Jakarta : Rajawali Press.
- Haryomataram. 1994. Sekelumit tentang Hukum Humaniter. Surakarta : Sebelas Maret University Press.100
- J.G.Starke. 2008. Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jean Pictet. 1985. Development and Principles of International Humanitarian Law: Martinus Nijhoff Publisher.
- Jeremy Scahill. 2008. Blackwater : The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. New York : Nation Books.
- Joachim. 2010. Transformation of The State : Reactions to The
- Marco Sassoli dan Antoine A.Bouvier. 2006. How Does Law Protect in War?. Geneva : ICRC.
- Maria Caparini dan Fred Schreier. 2005. Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies. Genewa : Occasional Paper, DCAF.
- Mas' oed, Mochtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.
- Masjhur Effendi, Moh. Ridwan, dan Muslich Subandi. 1995. Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional. Malang : IKIP Malang.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1980. Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta : Bina Cipta._____ . 1986. Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949. Bandung : Bina Cipta._____ . 1997. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta :Bina Cipta.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Olton, Roy dan Jack C. Plano. Internasional Relations Dictionary. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda.(Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, 1999)
- Privatization of Security In Great Britain. Bremen : TranState Working Papers.
- Sabrina Schulz and Christina Yeung. 2008. Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender. Jakarta : IDSPS Press._____ . 2008. Private Military and Security Companies and Gender, Gender and Security Reform Toolkit. Genewa : Occasional Paper, DCAF.
- Sidik Suraputra. 2004. Hukum Internasional dan BerbagaiPermasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan). Jakarta : Diadit Media.
- Stanger, Allison dan Mark Eric Williams, 2009. Private Military Company : benefit and cost of outsourcing security. New york.

Sukarwo, Wirawan. 2009. *Tentara Bayaran AS di Irak*. Gagas Media Jakarta Selatan.

Sukarwo, Wirawan. 2009. *Tentara Bayaran AS di Irak*. Jakarta : Gagas Media.

Sumaryo Suryokusumo. 1987. Organisasi Internasional. Jakarta :UI-Press. 101 _____ . 2007. Studi Kasus Hukum Internasional. Jakarta : PT Tata Nusa

Surakmat, Winarno, 1968, *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Badan Penerbit IKIP, Bandung

Taufik Rahman dkk. 2008. Obama : Tentang Israel, Islam, dan Amerika. Mizan Media Utama : Bandung.

Yves Sandoz, Christophe Swinarski, dan Bruno Zimmerman. 1987. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva : ICRC–Martinus Nijhoff Publishers.

Internet

Kompas.2011.SearchFrom:[http://international.kompas.com/read/2011/11/Perempuan Irak Jadi Korban Perdagangan Seks](http://international.kompas.com/read/2011/11/PerempuanIrakJadiKorbanPerdaganganSeks). Diakses pada tanggal 03 januari 2017..

Bruce Russet. 1993. *Grasping the Democratic Peace : Principles for a Post-Cold War World*. Princeton : Princeton University Press. Diakses dari http://www.cbsnews.com/2100-500257_162-3267286.html hari Selasa, tanggal 03 januari 2017.

Doug Brooks. *Protecting People: the Private Military Companies Potential:Comments and Suggestions for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services*, 25 Juli 2002. Diakses dari International 102 Peace operations Association (IPOA). <http://stabilityoperations.org/>, hari Selasa, tanggal 03 januari 2017.

International Committee of the Red Cross. *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Arm Conflict*. Dokumen disampaikan pada 30th International Conference of the Red Cross and

Red Crescent. Geneva, Switzerland. Tanggal 26-30 November 2007. Diakses pada hari Selasa, tanggal 03 januari 2017.

Jeremy Scahill. *The Secret US War in Pakistan*, 23 November 2009. Diakses dari <http://www.thenation.com/article/secret-us-warpakistan>, pada hari Rabu, tanggal 03 januari 2017.

Jerry Indrawan. *Status Private Military and Security Companies (PMSC) dalam Hukum Humaniter Internasional*. Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/28/status-private-militaryand-security-companies-pmsc-dalam-hukum-humaniterinternasional529473>.html. Diakses pada hari Selasa, tanggal 03 januari 2017.

Joe. Gurkha, *Sebuah Legenda Tentara Bayaran*. Diakses dari Blog Beranda Kata, pada hari Selasa, tanggal 04 januari 2017.

Kurt Schork. *Hors de combat*. Diakses dari <http://www.crimesofwar.org/az-guide/hors-de-combat/>, pada hari Rabu, tanggal 04 januari 2017.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), *OECD DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice*, OECD Publishing: Paris, (2007). Diakses dari www.wikipedia.com, pada hari Rabu, tanggal 04 januari 2017.

Ranny Emilia dan Amelia Khaira. *Permasalahan Kemanusiaan dalam Tata Kelola Keamanan Global : Kritik bagi Liberalisme*. Diakses pada hari Selasa, tanggal 04 januari 2017

The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict, International Committee for the Red Cross and Federal Department of Foreign 103 Affairs. www.wikipedia.com. Diakses pada hari Rabu, tanggal 05 januari 2017.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36277/1/10E00242.pdf>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 05 januari 2017.

<http://www.oecd.org/development/conflictandfragility/38406485.pdf>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 05 januari 2017.

Hapsari.2013.SearchFrom:<http://hapsari.dn.wordpress.com/2011/12/21/page/2>. Diakses pada tanggal 25 april 2016.

<http://b2hr-rakyat.blogspot.com/2012/11/hukum-perang-humaniterinternasional.html>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 05 januari 2017.

Anoninim. 2013. Search From. <http://www.poskotanews.com/2013/02/17/irak-10-tahun-pasca-invasi>. Diakses pada tanggal 25 april 2016.